

PEMBINGKAIAN PERNYATAAN GUBERNUR JAWA BARAT PADA PEMBERHENTIAN KEBAKTIAN KEBANGUNAN ROHANI DALAM MEDIA DARING

Tiara Kharisma

Pranata Humas Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

ABSTRAK

Peristiwa pemberhentian kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga, Bandung (6/6/2016) telah menjadi viral di media sosial dan mendapat banyak perhatian media massa maupun masyarakat. Terdapat pro dan kontra yang melibatkan pendapat dan persepsi dari berbagai pihak di media massa, baik media sosial maupun media konvensional. Hal ini menimbulkan perbincangan yang hangat dan cenderung memanas dalam beberapa kurun waktu, termasuk pemberitaan media massa yang dianggap mewakili ideologi media yang memberitakannya. Beberapa berita memuat pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan (Aher) yang menanggapi peristiwa pemberhentian KKR. Melalui tulisan ini, peneliti melakukan analisis framing dengan menggunakan pendekatan Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menganalisis pembingkai berita di media massa yang memuat pernyataan Gubernur Jabar dalam menanggapi pemberhentian kegiatan KKR di Bandung yang dimuat dalam KOMPAS.com dan BERITASATU.com. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa yang sama dapat dikonstruksi media dengan menonjolkan informasi yang berbeda. Jika KOMPAS.com berupaya mengonstruksi pesan yang membuat khalayak sedikit meredam pada peristiwa KKR di Sabuga, berbeda halnya dengan BERITASATU.com yang justru dapat berpotensi semakin membangkitkan emosi negatif khalayak kepada Gubernur Jabar.

Kata-kata Kunci: Pembingkai, berita, gubernur, analisis framing, media massa

FRAMING OF THE STATEMENT OF WEST JAVA GOVERNOR ABOUT TERMINATION OF KEBAKTIAN KEBANGUNAN ROHANI IN ONLINE MEDIA

ABSTRACT

Insident of termination of Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Activity in Sabuga, Bandung (6/6/2016) has become viral on social media and got a lot of mass media attention to proclaim the insident. There are pros and cons involving opinions and perceptions of various parties in the mass media, both social media and conventional media. This leads to a warm conversation and tends to heat up over time, including media coverage that is considered to represent the media ideology that preaches it. Some of them reported about statement of Governor of West Java, Ahmad Heryawan who respond to insident of termination of KKR in Sabuga. Through this article, the researcher conduct a framing analysis by using the approach of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki to analyze framing the news in KOMPAS.com and BERITASATU.com, that contain a statement Governor of West Java, when he responded the termination of KKR in Bandung. The results, showed that the same insident can be constructed and stress different information. If KOMPAS.com seeks to construct by trying to make the audience a bit of a damper on the insident in Sabuga KKR, unlike the case with BERITASATU.com that it can potentially generate negative emotions getting the audience to the Governor of West Java.

Keywords: Framing, news, governor, framing analysis, mass media

Korespondensi: Tiara Kharisma, S.I.Kom. Pranata Humas Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jl. Ampera Raya No. Kota Jakarta Selatan. *Email:* tiarakharisma@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perbincangan ataupun isu tentang Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) beberapa waktu belakangan cukup mendapat perhatian lebih dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Isu-isu tersebut memiliki ruang tersendiri bagi yang pro, kontra ataupun tidak memihak, baik di media mainstream, daring ataupun media sosial. 4 hari berselang setelah digelarnya aksi super damai 212 (2 Desember 2016) yang erat kaitannya dengan dugaan penistaan agama oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Kota Bandung telah terjadi sebuah peristiwa yang dianggap intoleran. Bila peristiwa tersebut tidak diklarifikasi, diatasi dan diselesaikan dengan baik, dapat berpotensi memunculkan ketegangan khususnya yang berkaitan dengan agama.

Pada Selasa, 6 Desember 2016, umat kristiani di wilayah Kota Bandung menggelar kegiatan KKR di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Jabar. Kegiatan KKR yang dipimpin Pendeta Stephen Tong rencananya akan dilaksanakan dalam dua sesi. Namun pada sesi kedua, KKR tidak dapat dilaksanakan sampai dengan selesai, karena terdapat sejumlah orang dari organisasi Pembela Ahlus Sunnah (PAS) meminta acara tersebut tidak dilanjutkan.

Peristiwa pemberhentian kegiatan KKR di Sabuga ini kemudian menjadi viral di media sosial dan mendapat banyak perhatian media massa untuk memberitakan peristiwa tersebut. Apalagi ditambah isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) beberapa waktu terakhir cukup menyita agenda publik. Peristiwa di Sabuga pada 6 Desember 2016 kemudian tak hanya menjadi pemberitaan media lokal dan regional, media massa berskala nasional juga turut memberitakan kejadian tersebut. Berdasarkan berita yang dimuat pada salah satu media massa, insiden tersebut sempat menjadi trending topik dunia dengan tagar #BandungIntoleran (Andriyanto, 2016). Tagar Bandung Intoleran sendiri pada Rabu (7/12) pukul 03.30 WIB telah mencapai 8.100 cuitan di media sosial twitter. Berbagai berita dimuat media massa dengan berbagai subtema pembahasan yang berkaitan dengan terhentinya kegiatan KKR di Sabuga.

Dari beberapa pemberitaan yang dimuat

media massa, penulis melihat dan merasakan ketertarikan terhadap pemberitaan yang memuat komunikasi pejabat publik dalam hal ini Gubernur Jabar, Aher terhadap peristiwa pemberhentian kegiatan KKR oleh sejumlah orang yang berasal dari PAS. Pernyataan Aher yang dibingkai beberapa media menimbulkan beberapa perdebatan bagi publik, seperti halnya yang penulis lihat pada komentar-komentar pembaca yang tertuang dalam berita yang dimuat di media daring maupun media sosial. Tak hanya itu, Aher pun sempat dirundung karena munculnya pernyataan yang telah dibingkai oleh beberapa media media (postmetro.co, 2016). Bahkan penyanyi terkemuka di Indonesia, Glenn Fredly juga turut mengomentari pernyataan Aher di media massa.

Atas paparan tersebut, melalui tulisan ini, penulis akan membahas tentang pembingkai berita pernyataan Aher tentang pemberhentian kegiatan KKR di Sabuga. Analisis framing tentang berita pernyataan Aher dilakukan pada berita yang dimuat di media daring KOMPAS.com dan BERITASATU.com. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan analisis framing untuk mengetahui bagaimana peristiwa dan pernyataan yang sama dikonstruksi oleh media dengan pandangan atau bingkai masing-masing. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pembingkai pernyataan Gubernur Jabar pada pemberhentian KKR dalam media daring.

METODE PENELITIAN

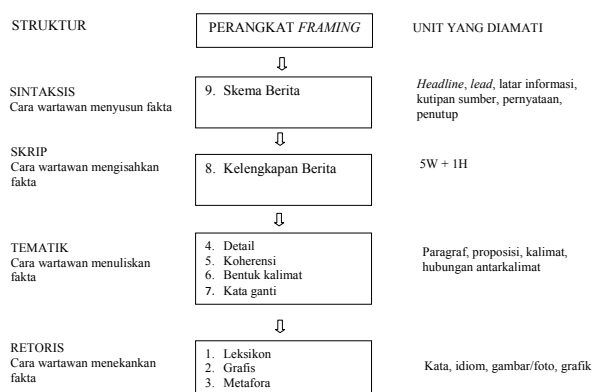
Penulis menggunakan metode analisis isi media dengan teknik analisis framing dari model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam membahas tentang pembingkai berita pernyataan Gubernur Jabar pada pemberhentian kegiatan KKR di Bandung. Berita yang dianalisis berasal dari dua media daring yaitu KOMPAS.com dan BERITASATU.com. Berita yang terkait dengan pernyataan Gubernur Jabar pada pemberhentian kegiatan KKR di Bandung diproduksi sebanyak 1 (satu) berita di KOMPAS.com dan 1 (satu) berita di BERITASATU.com. Seluruh berita dimuat pada hari yang sama yakni Rabu, 7 Desember 2016 (satu hari berselang dari peristiwa pemberhentian kegiatan KKR di Bandung) dengan waktu pemuatan yang berbeda-beda, namun tidak memiliki jarak

waktu yang terlalu jauh.

Adapun metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif. Melalui metode penelitian kualitatif, peneliti dapat memberikan makna data. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata yang teridentifikasi dalam konsep framing yang dikemukakan Pan dan Kosicki. Kemudian peneliti menerjemahkannya atau bahkan menjadikannya dimengerti (Neuman, 2011: 201). Analisis framing tergolong paradigma konstruksionis (Eriyanto, 2002: 13). Paradigma konstruksionis bersifat subjektif dan penafsiran bagiannya tidak terpisahkan dari penelitian teks bahkan dasar analisis teks. Analisis dalam paradigma konstruksionis mendasarkan diri pada penafsiran peneliti terhadap teks. Penelitian teks lebih diarahkan untuk melihat apa yang tersaji dalam pemberitaan (Eriyanto, 2002: 57). Dalam tulisan ini, penulis melakukan analisis framing menggunakan pendekatan Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Menurut Pan dan Kosicki ada dua konsepsi framing yang saling berkaitan yakni konsepsi psikologi dan sosiologis. Pan dan Kosicki membuat suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama konsepsi psikologis yang melihat frame sebagai persoalan internal pikiran dengan konsepsi sosiologis yang lebih tertarik melihat frame dari sisi bagaimana lingkungan sosial dikonstruksi seseorang (Eriyanto, 2002: 253). Menurut Pan dan Kosicki (dalam Linström & Marais, 2012: 21-38), memanfaatkan framing sebagai strategi metodologi membutuhkan konstruksi dan pengolahan wacana atau karakteristik dari wacana itu sendiri. Reese (dalam Linström & Marais, 2012: 21-38) menambahkan bahwa pendekatan framing menjembatani kecenderungan analisis sosial terhadap ketertutupan dan keterbukaan serta dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan.

Perangkat framing yang dikemukakan Pan dan Kosicki dibagi dalam empat struktur besar. Pertama, struktur sintaksis yang berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, pernyataan, opini, kutipan pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan berita. Kedua, struktur skrip yang berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Ketiga, struktur tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkannya pandangannya atas peristiwa



Sumber: Eriyanto, 2002: 256

Gambar 1 Model Framing Pan dan Kosicki

ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Keempat, struktur retorik berhubungan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Dalam struktur ini akan dilihat bagaimana pilihan kata, idiom, grafik yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca (Eriyanto, 2002: 255-256). Pendekatan Pan dan Kosicki dapat digambarkan dalam Gambar 1.

Paradigma konstruksionis tidak dapat dilepaskan dari konsep konstruksi sosial terhadap realitas yang dilakukan media massa. Dalam pandangan konstruksionis, tidak ada realitas dalam arti riil yang seolah-olah ada dan ajeg, sebelum peneliti mendekatinya. Realitas sosial tergantung pada bagaimana seseorang memahami dunia dan bagaimana menafsirkannya. Penafsiran dan pemahaman itulah yang kemudian disebut sebagai realitas (Eriyanto, 2002: 44). Oleh karenanya suatu kejadian, peristiwa atau kegiatan yang sama berpotensi membuahkan konstruksi realitas yang berbeda antara satu media dengan media lainnya. Pada dasarnya, pekerjaan media adalah mengonstruksikan realitas. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna (Hamad dalam Flora, 2014: 347-356). Ada tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media, khususnya oleh para komunikator massa tatkala melakukan konstruksi realitas, pemilihan simbol (fungsi bahasa), pemilihan fakta yang akan disajikan (strategi framing) dan kesediaan memberi tempat (*agenda setting*) (Hamad, 2004: 16).

Media dalam pandangan konstruksionis merupakan sarana antara interaksi awak media

untuk menghasilkan realitas yang disampaikan kepada khalayak. Bennet (dalam Eriyanto, 2002: 23) menyebutkan bahwa media sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Media massa melakukan konstruksi realitas sosial dengan "membingkai gambar realitas dengan cara memperkirakan (*predicabel*) dan berpola" (McQuail dalam Cissel, 2012: 67-77) yang dikonstruksi di antaranya penyajian suatu fakta atau peristiwa ke dalam berita. Berita itu sendiri terdiri dari narasi yang disusun jurnalis melalui beberapa kerangka atau tema tertentu, jurnalis membentuk interpretasi khalayak atas isu atau peristiwa (Pan & Kosicki dalam Nabi & Oliver, 2009: 84). Jurnalis adalah orang-orang yang seharusnya memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mencari informasi dan menyampaikannya dengan baik. Keberhasilan pekerjaan jurnalis dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani haknya (Agustin, Karlinah, Abdullah, & Supriadi, 2013)

Konstruksi realitas sosial oleh media massa tak dapat dipisahkan dengan konsep Teori Konstruksi Sosial. Menurut Peter L. Berger, teori Konstruksi Sosial lebih dikenal dengan teori dialektika, di mana realitas sosial yang pada dasarnya merupakan hasil konstruksi manusia (melalui mekanisme eksternalisasi dan objektivasi) "berbalik" membentuk manusia (melalui mekanisme internalisasi). Secara garis besar dalam Mc Quail (2010: 100) dikemukakan proposisi utama dari teori konstruksi sosial masyarakat-media adalah: Masyarakat adalah realitas yang terbentuk bukan realitas yang ada sebelumnya; Media berperan memberikan materi/informasi dalam terciptanya konstruksi sosial; Media menawarkan makna-makna dalam pesan-pesan/informasi yang disampaikannya, namun hal tersebut dapat dinegosiasikan atau bahkan ditolak oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan dan latar belakang yang dimilikinya; Media selektif dalam memproduksi informasi yang berisikan arti-arti tertentu; dan Media tidak dapat memberikan penilaian obyektif dari realitas sosial yang ada, karena semua realitas/kenyataan dapat diinterpretasikan berbeda.

Hal yang menjadi penting kaitannya dengan konstruksi sosial media massa adalah media berusaha mengangkat realita yang ada di dalam masyarakat berdasarkan ideologi media, sehingga nilai-nilai ideologi yang sudah dikonstruksi oleh media massa dicerna

masyarakat sebagai realita yang diyakininya. Teori agenda setting diperkenalkan Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Asumsi utama teorinya adalah *salience transfer* yaitu kemampuan media menyampaikan pentingnya hal-hal tertentu, seperti halnya dengan penekanan/penonjolan suatu hal dalam sebuah berita dalam media. McCombs & Gilbert (dalam Harris, 2004: 35) mendefinisikan agenda setting sebagai kemampuan media massa untuk membentuk kognisi khalayak dan mempengaruhi perubahan kognisi. Heath & Bryant (dalam Harris, 2004: 35) mendefinisikannya sebagai penciptaan kesadaran publik dan perhatian pada penonjolan isu oleh media massa. Agenda setting dapat membuat beberapa aspek realitas lebih menonjol dalam teks untuk mempromosikan atau melakukan penekanan hal-hal tertentu (V. Shah dkk.ed. Nabi & Oliver, 2009: 83).

Agenda setting terjadi dalam beberapa level, yaitu: penciptaan kesadaran, menentukan prioritas dan mempertahankan isu. Agenda setting menjadi fenomena yang mempengaruhi pekerja media yang terus-menerus saling memantau satu sama lain (khususnya sesama kompetitor) (Vivian, 2008: 495). Agenda setting juga merujuk pada ide, bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penekanan yang ditonjolkan oleh media massa terhadap suatu isu dan pentingnya keterkaitan isu tersebut dengan khalayak (McCombs & Shaw dalam Scheufele & Tewksbury, 2007 hal 9-20). Agenda setting pun merujuk pada pandangan bahwa media massa mempengaruhi penerimaan khalayak terhadap suatu berita dengan menggambarkan pemilihan fakta yang dinilai pantas untuk disiarkan dan seberapa besar signifikansi dan waktu yang diberikan (Danesi, 2013: 23-25).

Framing merupakan penelitian tentang bagaimana pemberitaan media dapat memengaruhi khalayak melalui pemilihan berita yang diangkat oleh media dan seberapa penting berita tersebut disiarkan atau dicetak (Nabi & Oliver, 2009: 83). Framing juga dapat disituasikan sebagai aspek dan perpanjangan dari teori agenda setting (Iyengar & Simon dalam Nabi & Oliver, 2009: 83). Goffman merupakan yang pertama memiliki perhatian pada framing sebagai bentuk komunikasi dan mendefinisikan framing sebagai "skema penafsiran" yang memungkinkan individu untuk "mencari, memahami, mengidentifikasi dan label" kejadian atau pengalaman hidup

(Goffman dalam Cissel, 2012: 67-77).

Tuchman dalam tulisannya *Making News: A Study in the Construction of Reality* menyatakan bahwa berita adalah jendela dunia, melalui frame, bahkan Amerika mengetahui diri mereka sendiri dan orang lain, lembaga, pemimpin, dan gaya hidup mereka, dan orang-orang dari negara-negara lain dan orang lain. Berita ini bertujuan memberitahu apa yang kita ingin tahu, perlu tahu, dan harus tahu. Tapi, seperti jendela yang menggambarkan dunia, frame berita mungkin bermasalah. Hal ini dikarenakan pandangan melalui jendela tergantung pada apakah jendela besar atau kecil, memiliki banyak panel atau sedikit, apakah kaca buram atau jelas, apakah jendela menghadapi jalan atau halaman belakang (Linström & Marais, 2012: 21-38).

Framing secara umum merujuk pada proses di mana pemaknaan diberikan kepada sebuah narasi dari isu politik atau sebuah peristiwa (Nabi & Oliver, 2009: 83). Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol. Framing juga didefinisikan menempatkan informasi lebih daripada yang lain, sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut (Eriyanto, 2002: 252).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Frame KOMPAS.com: Gubernur Jabar Menyesalkan Kegiatan Penghentian KKR dan Mencari Solusinya. Satu hari setelah peristiwa pemberhentian kegiatan KKR di Sabuga, Gubernur Jabar yang akrab disapa Aher memberikan pernyataan kepada awak media, kala posisinya sedang berada di Jakarta. Kemudian, pernyataan Aher tersebut diturunkan dalam sebuah berita di KOMPAS.com (7/12/2016) pada pukul 11.30 WIB yang berjudul "Aher Sesalkan Penghentian Ibadah di Bandung dan Janji Cari Solusi" (Kuwado, 2016). Dalam pandangan KOMPAS.com pernyataan Aher menekankan bahwa penghentian KKR oleh salah satu organisasi massa di Bandung seharusnya tidak perlu terjadi. KOMPAS.com juga memberikan penekanan bahwa pemerintah provinsi Jabar akan mencari solusi terkait permasalahan ini. Dalam bingkainya, KOMPAS.com mengemukakan bahwa meskipun tidak berada di Bandung (sedang berada di Jakarta), Gubernur Jabar ini telah mengetahui kronologi

peristiwa pemberhentian KKR di Sabuga, Bandung.

Dari analisis sintaksis, judul berita KOMPAS.com jelas menunjukkan pandangan KOMPAS.com bahwa pernyataan Aher menunjukkan perhatian terhadap peristiwa pemberhentian KKR dengan melakukan penekanan judul bahwa Aher menyesalkan mengapa kejadian pemberhentian KKR terjadi dan sebagai pemerintah yang menjamin hak menjalankan kegiatan keagamaan akan bergerak untuk mencari solusi. Judul semacam ini memberikan gambaran bahwa Aher peduli terhadap jaminan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Lebih jauh lagi, hal tersebut juga menunjukkan kepedulian Aher terhadap kerukunan serta kemajemukan umat beragama di wilayah Jabar.

KOMPAS.com dalam headline dan leadnya memberikan penekanan bahwa Aher memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kehidupan umat beragama, khususnya kebebasan menjalankan ibadah. Perhatian dan kepedulian ini ditekankan pada pernyataan bahwa Aher menyesali peristiwa di Sabuga dan seharusnya umat beragama harus mengedepankan musyawarah. Dia juga akan mencari solusi, serta menyampaikan bahwa Aher meski tengah berada di luar kota tetapi telah mengetahui kronologi.

KOMPAS.com pada bagian tengah (setelah lead) menyampaikan latar informasi tentang kronologi pemberhentian KKR di Sabuga dan menjelaskan kembali bahwa penghentian dilakukan pada sesi kedua tidak dari awal serta atas dasar kesepakatan dengan menambahkan kutipan sumber dan pernyataan dari kedua belah pihak (yang berupaya menghentikan dan dihentikan). Narasumber utama dalam berita tersebut adalah Aher, namun KOMPAS.com tetap mencoba mengangkat sumber lain sebagai pihak yang pemberhentian (organisasi PAS) dan dihentikan (panitia KKR). Ini menunjukkan bahwa KOMPAS.com mencoba menyampaikan keberimbangan berita. Ini ditunjukkan dalam kalimat: "Setelah itu, mereka menyepakati pukul 18.00 WIB tidak dilanjutkan. Kami menyarankan supaya mereka melaksanakan ibadahnya di tempat yang sesuai dengan undang-undang negara ini," kata Roin di halaman Sabuga. "Kami tidak memperlakukan ibadah tidak dilaksanakan, kami membubarkan diri baik-baik dan tidak ada dendam," kata dia.

Lebih lanjut pada penutup KOMPAS.com membingkai bahwa penghentian KKR atas dasar diskusi dan pihak panitia tidak bermasalah. Ini ditunjukkan dalam kalimat: "Setelah berdiskusi, panitia pelaksana KKR sepakat menghentikan kebaktian sesi kedua pada malam hari". Pernyataan tersebut dapat menyajikan realitas dan memberikan efek kepada pembaca bahwa sebenarnya kegiatan penghentian bukan atas dasar paksaan tetapi memang atas dasar kesepakatan. Dengan demikian, dapat memunculkan interpretasi bahwa tidak ada upaya memaksa atau menindas terhadap kaum minoritas. Hal ini diharapkan dapat berimbang pada citra partai karena citra tersebut tentu dibangun salah satunya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan (Nurussa'adah & Sumartias, 2017), termasuk tindakan yang dilakukan kadernya.

Dalam struktur skrip, KOMPAS.com menyajikan kelengkapan berita, khususnya dalam aspek why, diberikan penekanan bahwa Aher menyatakan peristiwa tersebut karena tidak ada musyawarah. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan Aher: "Pria yang akrab disapa Aher tersebut mengatakan, jika ada musyawarah di antara pihak berkepentingan sejak jauh-jauh hari, peristiwa semacam itu tidak perlu terjadi". "Kalau bisa ada musyawarah yang jelas jauh-jauh hari, tidak mepet, berpikir jernih, saya pikir tidak ada masalah seperti itu," kata Aher, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/12/2016). Pemuatan pernyataan tersebut kembali menekankan bahwa dalam kehidupan umat beragama harus mengedepankan musyawarah untuk menghindari masalah. Kelengkapan berita disajikan pada paragraf awal sampai dengan tengah kemudian ditambahkan dengan informasi tambahan menjelang penutup. Informasi tambahan yang berkaitan dengan kronologi kejadian juga disajikan secara berimbang.

Dalam struktur tematik, ada beberapa tema yang dibingkai KOMPAS.com yang mencoba ingin disampaikan kepada khalayak, yaitu: (1) adanya perhatian dan kepedulian pemerintah provinsi Jabar karena terhentinya KKR di Sabuga. Hal ini digambarkan dengan penyampaian kata penyesalan dan akan adanya upaya pencarian solusi serta Aher pun telah mengetahui kronologi peristiwa (2) umat beragama harus mengedepankan musyawarah terhadap suatu masalah (3) penghentian KKR

tidak dari awal kegiatan, namun pada sesi kedua dan bukan atas paksaan salah satu pihak tapi hasil diskusi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pada aspek retorik, kata yang digunakan KOMPAS.com untuk menggambarkan kegiatan KKR adalah penggunaan kata ibadah, bukan KKR. Dengan digunakan kata ibadah, penulis memandang bahwa kata tersebut lebih memiliki konteks yang lebih luas, dalam arti digunakan bagi setiap umat beragama. Apalagi jika dikaitkan dengan hak beribadah, dengan penggunaan gabungan kata penghentian ibadah, menunjukkan bahwa telah ada pelanggaran hak azasi yang paling hakiki. Ini tentunya akan memiliki padanan yang berbeda jika yang digunakan adalah kata kebaktian. Pada prinsipnya, media massa secara aktif melaporkan liputan politiknya memberi dampak yang amat signifikan memberi perkembangan pendidikan politik di masa depan (Yodiansyah, 2017). Oleh karena itu, pemberitaan media diharapkan mampu menjadi media pendidikan politik masyarakat.

Kata ibadah juga dilabelkan KOMPAS.com dalam judul berita. Dalam pernyataannya, Aher juga menggunakan idiom berpikir jernih dan menahan diri yang ditujukan kepada masyarakat serta kembali memberikan penekanan untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Kosakata yang kerap digunakan banyak yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama seperti kata musyawarah, berpikir jernih, menahan diri, mencari solusi, menciptakan suasana kondusif, toleransi, kehidupan sosial bersama, menyepakati dan menyarankan. Dalam berita ini, KOMPAS.com hanya menggunakan foto Aher yang diambil dari kegiatan lain (bukan saat diwawancarai).

Dari frame berita pernyataan Aher, penulis juga memandang bahwa KOMPAS.com berusaha membuat berita berimbang, tidak memperkeruh suasana, dan menunjukan perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kemajemukan serta kehidupan beragama. Penekanan kata yang digunakan KOMPAS.com adalah penggunaan kata ibadah (yang konteksnya seluruh agama), dibandingkan dengan penggunaan kata KKR ataupun kebaktian (konteksnya lebih sempit, biasanya untuk umat kristiani) yang penulis maknai sebagai upaya menghindarkan penekanan terhadap kaum minoritas. Pilihan kata ini menunjukkan sikap

dan ideologi tertentu (Eriyanto, 2002: 265) dari sebuah media massa. Penulis memaknai bahwa frame berita ini dibentuk sesuai dengan tagline yang kerap dikampanyekan KOMPAS.com "Rayakan Perbedaan". Tagline KOMPAS.com ini tentu memiliki kaitan erat dengan ideologi yang dipegang KOMPAS.com.

Frame BERITASATU.com: Gubernur Jabar Menyatakan Pembubaran Kebaktian sebagai Kejadian Kecil. Sama halnya seperti KOMPAS.com, sehari setelah pemberhentian KKR di Sabuga BERITASATU.com memuat berita pernyataan Gubernur Jabar yang lebih cepat beberapa menit dari KOMPAS.com yakni pukul 11.12 WIB. Berita tersebut berjudul "Pembubaran Kebaktian Bandung, Aher: Itu Kejadian Kecil" (Paath, 2016). Dari frame yang dibentuk dalam judul, BERITASATU.com jelas membingkai bahwa Aher memandang kejadian di Sabuga (6/12/2016) hanya kejadian kecil. Ini dapat menimbulkan interpretasi bahwa pemerintah provinsi Jabar memiliki perhatian yang minim terhadap jaminan kebebasan menjalankan ibadah bagi umat beragama.

Dalam judul, jika dilihat pada alamat skrip situs web BERITASATU.com (Paath, 2016) bahwa judul berita biasanya sesuai dengan alamat skrip situs web, tetapi penulis mengamati terdapat perbedaan. Mungkin saja pada awal penulisan judul berita oleh jurnalis sesuai dengan skrip situs web, namun ketika sampai kepada tangan editor terdapat perubahan yang kemudian memberikan penekanan framing berita pada pandangan Aher yang menilai kejadian di Sabuga adalah kejadian kecil. Jika dugaan penulis benar, ini menunjukkan bahwa dalam proses framing suatu berita, tidak hanya bergantung pada jurnalis yang mengonstruksi sebuah realitas tetapi juga konstruksi dari perangkat redaksi baik editor maupun redaktur.

Lebih lanjut dalam lead berita, dibingkai pula bahwa Aher sampai sejauh ini belum mendapatkan laporan terperinci tentang kejadian tersebut, tetapi kemudian BERITASATU.com mencoba meminimalisir pernyataan bertendensi negatif pada Aher yang dimuat pada kalimat selanjutnya dengan mengungkapkan bahwa Aher sudah mengetahui kronologi kejadian. Berbeda dengan KOMPAS.com yang membingkai berita dengan menekankan bahwa Aher telah mengetahui kronologi peristiwa pemberhentian KKR tanpa membahas tentang laporan insiden pemberhentian KKR. Penekanan

pada bagian awal yang menyatakan bahwa Aher belum mendapat laporan, menjadi semakin mendukung bingkai sikap Aher yang minim kepedulian/perhatian terhadap pemberhentian kebaktian dan jaminan kebebasan menjalankan ibadah bagi umat beragama di Jabar.

Kemudian, BERITASATU.com kembali mencoba meminimalisir tendensi negatif pernyataan Aher yang menganggap insiden di Sabuga sebagai kejadian kecil dengan mengangkat pernyataan bahwa semua pihak harus menahan diri dan menghormati. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pemerintah provinsi Jabar akan menyelesaikan dan mencari solusi atas insiden tersebut. Tetapi, dalam paragraf berikutnya, BERITASATU.com kembali melakukan penekanan bahwa Aher menganggap kecil kejadian di Sabuga dengan "memainkan" hubungan antarkalimat dan paragraf. BERITASATU.com mencoba mengaitkan kronologi pemberhentian KKR pada kalimat sebelumnya dan kemudian menyambungkan pada kalimat bahwa pemberhentian itu adalah kejadian kecil. Berikut adalah kalimat tersebut: Seperti diberitakan, acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang digelar di Gedung Sabuga, Jalan Tamansari Kota Bandung, dengan menghadirkan Pendeta Stephen Tong terpaksa berakhir dini, Selasa (6/12) malam waktu setempat karena diinterupsi oleh massa. Kelompok yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah (PAS) itu memaksa panitia mengakhiri acara dengan alasan kegiatan kebaktian harus digelar di gereja, bukan gedung umum. "Itu kan kejadian kecil yang tidak mengganggu apa-apa saya kira," kata Ahmad.

Narasumber yang dikutip dalam BERITASATU.com hanya ada dua yaitu Aher dikutip secara langsung dan Ridwan Kamil yang pernyataannya dikutip dari akun pribadinya di media sosial. Pernyataan Ridwan Kamil dikemukakan menjelang bagian penutup. Tetapi penulis memandang bahwa kutipan pernyataan Ridwan Kamil seperti membenturkan pernyataan Aher sebelumnya. Di mana sebelumnya Aher merespon insiden di Sabuga adalah kejadian kecil, sedangkan pernyataan Ridwan Kamil menyatakan sebuah permintaan maaf dan telah melakukan upaya langsung di tempat kejadian, namun gagal untuk tetap melanjutkan acara.

Dalam struktur skrip, BERITASATU.com

tidak menyajikan kelengkapan berita, karena dalam berita yang ditayangkan tidak memuat aspek mengapa (*why*). Berbeda KOMPAS.com yang memuat pernyataan Aher tentang mengapa insiden pemberhentian KKR itu terjadi. Dengan tidak dimuatkannya aspek mengapa ini, menjadi ada sesuatu yang hilang dan dapat berpotensi menimbulkan interpretasi lain bagi pembaca bahwa pemerintah memang tidak tahu mengapa insiden tersebut terjadi. Ini semakin mendukung frame pemberitaan pernyataan Aher yang tidak begitu peduli dan menganggap pemberhentian KKR sebagai kejadian kecil. Sebenarnya, ada konteks kaliat yang memuat kata musyawarah yang disebutkan KOMPAS.com sebagai aspek mengapa yang dimuat KOMPAS.com mengapa insiden tersebut terjadi, tetapi BERITASARU.com mengemasnya bukan aspek mengapa tetapi pada aspek bagaimana (*how*).

Di sisi lain, BERITASATU.com menunjukkan bahwa meski dianggap sebagai kejadian kecil, namun pihak pemerintah telah mengambil langkah, hanya dalam konstruksinya, BERITASATU.com menekankan bahwa pihak pemerintah yang telah mengambil sikap adalah yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bandung bukan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Aher. Untuk mendukung penekanan tersebut, BERITASATU.com juga memuat pernyataan Aher bahwa pemerintah provinsi Jabar tidak terkait. Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu paragraf berita:

Aher mengatakan insiden tersebut telah ditangani Polresta Bandung, Majelis Ulama Bandung (MUI) Bandung, Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Wali Kota Bandung. "Secara langsung, Pemerintah Provinsi Jabar tidak terkait, jadi mungkin lebih detail, tanya teman-teman kota Bandung, para pihak yang terkait langsung," kata dia.

Penyataan Aher tersebut juga menguatkan pandangan bahwa Aher memandang kejadian di Sabuga sebagai kejadian kecil dengan menggambarkan seolah-olah itu menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah kota Bandung, pemerintah Provinsi Jabar sendiri tidak berkaitan secara langsung. Selain itu, dengan menyertakan pernyataan Aher yang mengarahkan untuk menanyakan kepada pemerintah Kota Bandung membingkai bahwa Aher seakan-akan lepas tangan dalam hal

menjamin kebebasan menjalankan aktivitas beragama di wilayah Jabar (karena Bandung sendiri merupakan wilayah Jabar). Hal tersebut berpotensi semakin menunjukkan bahwa Aher terkesan tidak memiliki perhatian/kepedulian pada insiden pemberhentian KKR di Sabuga.

Meski ada beberapa pernyataan Aher yang bernada (*tone*) positif, namun BERITASATU.com pada sebelum ataupun sesudah kalimatnya memunculkan pernyataan Aher yang bernada minimnya perhatian dari pemerintah provinsi Jabar, seperti halnya:

Aher mengatakan insiden tersebut telah ditangani Polresta Bandung, Majelis Ulama Bandung (MUI) Bandung, Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Wali Kota Bandung. "Secara langsung, Pemerintah Provinsi Jabar tidak terkait, jadi mungkin lebih detail, tanya teman-teman kota Bandung, para pihak yang terkait langsung," kata dia. Dia menyatakan, seluruh warga diminta membangun kebersamaan dan saling toleran agar kondisi tidak semakin keruh. "Kita ini semua bersaudara sebagai bangsa, kita bangun saling pengertian jangan memperkeruh persoalan yang dapat memicu persoalan baru," ujarnya.

Dengan demikian, meski mencoba untuk terlihat tidak menekan pada frame tertentu atau mencoba menunjukkan keberimbangan pemberitaan, namun dengan adanya susunan kalimat demikian, menunjukkan bahwa BERITASATU.com membingkai pernyataan Aher yang mampu menimbulkan kontroversi dan interpretasi negatif dari khalayak. Jika KOMPAS.com membingkai berita dengan berimbang dan menunjukkan bahwa pemberhentian aktivitas ibadah bukan karena paksaan tetapi karena adanya kesepakatan dan diskusi, tidak demikian dengan yang dibingkai BERITASATU.com yang ditunjukkan dalam kalimat berita:

Seperti diberitakan, acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang digelar di Gedung Sabuga, Jalan Tamansari Kota Bandung, dengan menghadirkan Pendeta Stephen Tong terpaksa berakhir dini, Selasa (6/12) malam waktu setempat karena diinterupsi oleh massa. Kelompok yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah (PAS) itu memaksa panitia

mengakhiri acara dengan alasan kegiatan kebaktian harus digelar di gereja, bukan gedung umum.

Lebih lanjut, dalam berita berjudul “Pembubaran Kebaktian Bandung, Aher: Itu Kejadian Kecil”, berdasarkan aspek tematik, ada beberapa tema yang ditekankan yaitu: (1) Aher menganggap kecil kejadian pemberhentian KKR di Sabuga, sudah

mengetahui kronologi tapi belum menerima laporan dan ini mengindikasikan minimnya perhatian/kepedulian pemerintah provinsi Jabar terhadap jaminan pelaksanaan kegiatan agama (2) Aher menyatakan bahwa pihaknya tidak terkait langsung dan terkesan lepas tangan dengan menyatakan bahwa untuk lebih detail mengarahkan pertanyaan kepada Pemerintah Kota Bandung (3) Penghentian acara KKR adanya pemaksaan oleh PAS kepada Panitia.

Tabel 1 Perbandingan Frame KOMPAS.com dan BERITASATU.com

Perangkat Framing	KOMPAS.com	BERITASATU.com
Frame Judul	Aher menyesalkan mengapa pemberhentian KKR terjadi dan berupaya mencari solusi	Aher menganggap pemberhentian KKR hanya kejadian kecil dan pihaknya tidak memiliki kaitan langsung
Sintaksis/Skema Berita	Perhatian dan kepedulian Gubernur Jabar terhadap jaminan aktivitas keagamaan dengan menempatkan pernyataan penyesalan penghentian KKR dan upaya untuk mencari solusi ditempatkan di awal, barulah kemudian menyampaikan mengapa peristiwa ini terjadi	Minimnya perhatian Gubernur Jabar terhadap aktivitas keagamaan, khususnya jaminan pelaksanaan ibadah dengan menempatkan pandangan Aher yang menganggap penghentian KKR adalah kejadian kecil pada paragraf awal dan judul berita. Meskipun memasukkan pernyataan Aher yang bernada positif, namun kembali dimunculkan pernyataan yang mengindikasikan kurangnya perhatian dari pemerintah.
Skrip	Berita disajikan lengkap dan memberikan penekanan pada aspek kepedulian pemerintah pada kehidupan umat beragama dan pentingnya musyawarah antarumat	Berita disajikan tidak lengkap (kurangnya aspek why) dan lebih menekankan bahwa pemerintah tidak memberi perhatian penuh pada jaminan melaksanakan ibadah keagamaan
Tematik	(1) perhatian dan kepedulian pemerintah provinsi Jabar dalam kegiatan beragama (2) umat beragama harus mengedepankan musyawarah terhadap suatu masalah (3) penghentian KKR tidak dari awal kegiatan, namun pada sesi kedua dan bukan atas paksaan salah satu pihak tapi hasil diskusi dan kesepakatan kedua belah pihak	(1) Minimnya perhatian/kepedulian pemerintah provinsi Jabar terhadap jaminan pelaksanaan kegiatan agama (2) Pihak pemerintah provinsi Jabar tidak terkait langsung dan terkesan lepas tangan pada pemberhentian KKR di Sabuga, Bandung (3) Penghentian acara KKR adanya pemaksaan oleh PAS kepada Panitia
Retoris	Penekanan label kerukunan umat beragama melalui pengangkatan aspek musyawarah/diskusi dan ajakan menciptakan suasana kondusif serta perhatian pemerintah provinsi Jabar untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi	Penekanan label perseteruan umat beragama dengan adanya pemaksaan dalam pemberhentian KKR. Tidak ada upaya penyelesaian dan perhatian dari pemerintah provinsi Jabar terhadap insiden di Sabuga, Bandung

Dari analisis framing yang telah penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan Pan dan Kosicki terhadap kedua media daring di atas, ringkasan framing berita pernyataan Gubernur Jabar pada pemberhentian kegiatan KKR di Bandung dalam KOMPAS.com dan BERITASATU.com ditunjukkan dalam Tabel 1.

Pada aspek retorik, BERITASATU.com menyertakan foto suasana kebaktian yang kemudian dihentikan oleh organisasi massa bersumber dari media sosial facebook. Dalam keterangannya, BERITASATU.com menyebut istilah massa, tetapi yang nampak hanya beberapa orang yang bukan anggota kebaktian yang ada dalam gambar suasana kebaktian. Selain itu, caption foto tidak menjelaskan secara rinci mana yang disebut perwakilan massa atau aparat keamanan, ketidaklengkapan ini dapat berpotensi memunculkan *missed* interpretasi bagi pembaca. Foto ini juga diperoleh dari media sosial facebook, namun tidak menyebut secara rinci dari bersumber akun siapa dan diakses kapan, seharusnya jika mengikuti kaidah jurnalistik, jurnalis menyebutkan sumber foto berasal dari mana. Berbeda halnya dengan KOMPAS.com, meski tidak menggunakan foto yang merujuk langsung pada peristiwa, namun tetap menyebutkan sumber dan waktu pengambilan foto tersebut.

Selain itu, BERITASATU.com pada judul dan beritanya menggunakan kata kebaktian untuk menunjukkan aktivitas keagamaan yang terhenti. Kata kebaktian ini memiliki konteks yang lebih sempit (untuk umat kristiani) berbeda dengan kata ibadah yang digunakan KOMPAS.com yang memiliki makna lebih luas. Dengan penggunaan kata tersebut dan disertakan pula dalam judul, penulis memandang bahwa dapat berpotensi memunculkan interpretasi khalayak dengan menuju kepada pandangan penekanan terhadap kaum minoritas dalam melakukan aktivitas ibadah. Ada beberapa pernyataan Aher yang menggunakan idiom positif dengan bernada positif, namun BERITASATU.com pada sebelum ataupun sesudah kalimat memunculkan pernyataan Aher yang bernada negatif, sehingga muncul kembali konstruksi bahwa tidak ada perhatian dari pemerintah provinsi Jabar terhadap insiden Sabuga (6/12/2016).

SIMPULAN

Framing yang dikonstruksi oleh media dengan menekankan pada pernyataan Aher yang menganggap bahwa pemberhentian KKR di Sabuga sebagai kejadian kecil, kemudian mengundang kontroversi bagi masyarakat, khususnya dalam media sosial (postmetro.co, 2016). Ini menunjukkan bahwa peristiwa yang sama dapat dikonstruksi dan menonjolkan informasi yang berbeda (Eriyanto, 2002: 254). Jika KOMPAS.com berupaya mengonstruksi dengan mencoba membuat khalayak sedikit meredam pada peristiwa KKR di Sabuga, berbeda halnya dengan BERITASATU.com yang justru dapat berpotensi semakin membangkitkan emosi negatif khalayak kepada Gubernur Jabar.

Penulis juga menilai bahwa KOMPAS.com berusaha untuk berimbang dan netral dalam menyampaikan realitas tentang penghentian aktivitas ibadah dan mengutamakan kerukunan umat beragama yang senada dengan tagline-nya "Rayakan Perbedaan". Hal tersebut penulis maknai sebagai upaya KOMPAS.com dalam melaksanakan salah satu fungsi sosial media massa, yakni sebagai korelasi sosial. Ini berbeda dengan BERITASATU.com, meski berupaya berimbang, namun kembali menautkan pernyataan Aher yang bernada negatif yang pada akhirnya berpotensi memunculkan interpretasi negatif khalayak terhadap sikap Gubernur Jabar.

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis atas tulisan ini antara lain: Dalam memproduksi sebuah berita yang memuat informasi yang mengandung konflik, (seperti halnya berita tentang pemberhentian KKR di Bandung), pihak yang terlibat dalam praktek pembuatan berita (*newswork*) dalam media massa (termasuk jurnalis, editor serta individu lain yang terlibat dalam pekerjaan membuat berita di media massa) selain memperhatikan ideologi institusi media, mereka pun harus mempertimbangkan unsur nilai berita, salah satunya yang berkaitan dengan konflik, yaitu di mana *newswork* harus menunjukkan keseimbangan dalam melihat suatu isu konflik dalam dua sisi. *Newswork* bukan hanya memproduksi berita dengan bingkai yang populer sehingga mampu dikonsumsi banyak khalayak, tetapi juga harus memperhatikan keberimbangan dan kenetralan media massa terhadap suatu isu.

Dalam mengkonstruksi sebuah realitas

menjadi berita, media massa hendaknya kembali mengingat salah satu fungsi sosial dari media massa yakni korelasi sosial, di mana media massa hendaknya dapat menghubungkan suatu kelompok (khususnya kelompok SARA) dengan kelompok lainnya sehingga terjadi konsesus, bukan justru mengonstruksi berita yang malah berpotensi menimbulkan konflik baru atau terkesan memanas-manasi (Sendjaja, 2016). Ini akan memberikan kontribusi besar untuk kembali membangun konsesus bahwa Indonesia adalah negara yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Penelitian ini masih dapat dikembangkan karena saat ini masih berdasarkan pada penelitian teks berita, belum menyentuh pada analisis kontruksi berita pada proses penyusunan dan editing berita. Hanya ada satu dugaan yang disertakan penulis bahwa telah ada kontruksi dalam meja editor ketika melihat judul berita dan alamat skrip situs web BERITASATU.com berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., Karlinah, S., Abdullah, A., & Supriadi, D. (2013). Pemetaan kebutuhan kualifikasi jurnalis pemula pada industri media massa di Indonesia, *Jurnal Kajian Komunikasi* 141–154
- Andriyanto, H. (2016). *Pembubaran kebaktian bandung jadi trending dunia*. Diakses pada 9 Desember 2016, dari <http://www.beritasatu.com/nasional/403274-pembubaran-kebaktian-bandung-jadi-trending-dunia.html>
- Cissel, M. (2012). Media framing: a comparative content analysis. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications*. Vol. 3, No. 1 Hal 67-77. <http://www.elon.edu/docs/e-web/academics/communications/research/vol3no1/08cisselejspring12.pdf>
- Danesi, M. (ed). (2013). *Encyclopedia of media and communication*. Canada: University of Toronto Press
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi dan politik media*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Flora, E. (2014). Analisis framing berita calon presiden ri 2014-2019 pada surat kabar kaltim post dan tribun kaltim. *eJournal Ilmu Komunikasi* 2014, 2 (3): 347-356. [http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/jurnal%20elina%20flora%20ok%20\(08-27-14-03-33-14\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/jurnal%20elina%20flora%20ok%20(08-27-14-03-33-14).pdf)
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa*. Jakarta: Granit
- Harris, R. J. (2004). *A cognitive psychology of mass communication*. New Jersey: Lawrance Erlbaum Associates, Publisher
- Kuwado, F. J. (2016). *Aher sesalkan penghentian ibadah di bandung dan janji cari solusi*. Diakses pada 10 Desember 2016 dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/07/11305231/aher.sesalkan.penghentian.ibadah.di.bandung.dan.janji.cari.solusi>
- Linström, M.& Marais, W. (2012). Qualitative news frame analysis: a methodology. *Journal of Communitas* hal 21-38. http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/3650/comm_v17_n1_a9.pdf?sequence=3
- Mc Quail, D. (2010). *Mass communication theory*. London: Sage Publication
- Nabi, R L. dan Oliver, M. B. (2009). *The sage handbook of media process and effects*. United States of America: sage Publication.
- Neuman, W. L. (2011). *Social research methods: qualitative and quantative aproaches, 7th edition*. Alih bahasa: Edina T. Sofia. Jakarta: PT. Indeks
- Nurussa'adah, E., & Sumartias, S. (2017). Komunikasi politik partai keadilan sejahtera (pks) dalam keterbukaan ideologi 1. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5/1, 43–52
- Paath, CKY. (2016). *Pembubaran kebaktian bandung, aher: itu kejadian kecil*. Diakses pada 12 Desember 2016 dari <http://www.beritasatu.com/nasional/403323-pembubaran-kebaktian-bandung-aher-kita-cari-akar-masalahnya.html>
- Postmetro.co. (2016). *Duh aher dibully setelah pernyataannya*. Diakses pada 9 Desember 2016 dari <http://www.postmetro.co/2016/12/duh-aher-dibully-setelah-pernyataannya.html>
- Scheufele, D. A dan Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting, and priming: the evolution of three media effect models. *Journal of Communication* vol.57 no. 1. Maret hal 9-20
- Sendjaja, S. D. (2016). *Komunikasi massa: konsepsi, karakteristik, fungsi dan*

perkembangannya di indonesia. Dipetik dari Paparan Mata Kuliah Perspektif dan Teori Komunikasi Massa pada 9 September 2016. FISIP. UI

Vivian, J. (2008). *Teori komunikasi massa*. Alih bahasa: Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group

Yodiansyah, H. (2017). Komunikasi politik media surat kabar dalam studi pesan realitas politik pada media cetak riau pos dan tribun. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5/1(42), 11–30